



SEJARAH SINGKAT SOSIALISASI EMPAT PILAR MPR RI

PROSES PENGHAPUSAN SOSIALISASI PANCASILA PADA ERA REFORMASI



**ORDE BARU
JATUH
(1998)**

**TAP MPR NO. II/MPR/1978
Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Panca Sila (P4)
DICABUT**

**Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman
Penghayatan dan Pengalaman Panca Sila (BP-7)
DIBUBARKAN**

**Mata Pelajaran Panca Sila Sebagai Mata Pelajaran Pokok
di Sekolah dan Perguruan Tinggi
DIHAPUS**

Pasal 39 UU No 2 tahun 1989 tentang SISDIKNAS

Pasal 39

- (1) Isi kurikulum merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional.
- (2) Isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat :
 - a. pendidikan Pancasila; ←
 - b. pendidikan agama; dan
 - c. pendidikan kewarganegaraan.
- (3) Isi kurikulum pendidikan dasar memuat sekurang-kurangnya bahan kajian dan pelajaran tentang :
 - a. pendidikan Pancasila; ←
 - b. pendidikan agama;
 - c. pendidikan kewarganegaraan;
 - d. bahasa Indonesia;
 - e. membaca dan menulis;
 - f. matematika (termasuk berhitung);
 - g. pengantar sains dan teknologi;
 - h. ilmu bumi;
 - i. sejarah nasional dan sejarah umum;
 - j. kerajinan tangan dan kesenian;
 - k. pendidikan jasmani dan kesehatan;
 - l. menggambar; serta
 - m. bahasa Inggris.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

Pasal 37 UU No 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS

PASAL 37

- (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:
 - a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan kewarganegaraan;
 - c. bahasa;
 - d. matematika;
 - e. ilmu pengetahuan alam;
 - f. ilmu pengetahuan sosial;
 - g. seni dan budaya;
 - h. pendidikan jasmani dan olahraga;
 - i. keterampilan/kejuruan; dan
 - j. muatan lokal.
- (2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:
 - a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan kewarganegaraan; dan
 - c. bahasa.



PENDIDIKAN PANCASILA HILANG DARI KURIKULUM PENDIDIKAN NASIONAL

TAFSIR PANCASILA DISERAHKAN KEPADA MEKANISME PASAR BEBAS



PANCASILA

-  KETUHANAN YANG MAHA ESA
-  KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
-  PERSATUAN INDONESIA
-  KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN
-  KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

SEKOLAH/PERGURUAN TINGGI BOLEH MEMASUKKAN MATA PELAJARAN PANCASILA, BOLEH TIDAK

SETIAP ORANG/KELOMPOK BEBAS MENAFSIRKAN SILA-SILA PANCASILA SESUAI SELERANYA MASING - MASING

UNTUK MENGISI KEKOSONGAN PERAN NEGARA DALAM MEMBENTUK MENTAL DAN IDEOLOGI BANGSANYA, HM. TAUFIQ KIEMAS SEBAGAI KETUA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (MPR RI) PERIODE 2009-2014, MERANCANG DAN MELAKSANAKAN AGENDA PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA YANG DILAKUKAN MELALUI SOSIALISASI EMPAT PILAR.



PANCASILA

PANCASILA SEBAGAI DASAR DAN IDEOLOGI NEGARA

**UUD NRI
TAHUN 1945 DAN
TAP MPR**

**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA DAN TAP
MPR**

NKRI

**NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
SEBAGAI BENTUK NEGARA**

**BHINNEKA
TUNGGAL IKA**

**BHINNEKA TUNGGAL IKA SEBAGAI
SEMBOYAN NEGARA**



4

**PILAR
MPR RI**

SOSIALISASI EMPAT PILAR DENGAN BERBAGAI METODE

Sosialisasi oleh Anggota MPR di Daerah Pemilihan

Sosialisasi Kepada Tokoh Masyarakat

Training of Trainers (TOT) Sosialisasi Empat Pilar MPR RI

Sosialisasi untuk memenuhi undangan/permintaan instansi/ormas

Sosialisasi di Kabupaten/Kota

Sosialisasi Dengan Metode Outbound.

LANJUTAN...

Sosialisasi Kepada Aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota

Kemah/Jambore Empat Pilar

Pendidikan Bela Negara

Sosialisasi Kepada Masyarakat Tertentu

Lomba Cerdas Cermat

Sosialisasi Dengan Metode Pergelaran Budaya

Sosialisasi Dengan Metode Elektronik

BENTUK KEGIATAN SOSIALISASI EMPAT PILAR MPR RI

CERAMAH

DIALOG

OUTBOND

KEMAH/JAMBORE

LOMBA

DISKUSI KELOMPOK

SIMULASI KELOMPOK

DLL

SASARAN DAN TARGET SOSIALISASI EMPAT PILAR MPR RI

**ORMAS/
UNDANGAN**

**GURU DAN
DOSEN**

**APARATUR
PEMERINTAH**

**TOKOH
MASYARAKAT**

**MASYARAKAT
DI DAPIL**

**SISWA DAN
MAHASISWA**

**KOMUNITAS
HOBI**

**MASYARAKAT
DI LUAR
NEGERI**

TNI/POLRI

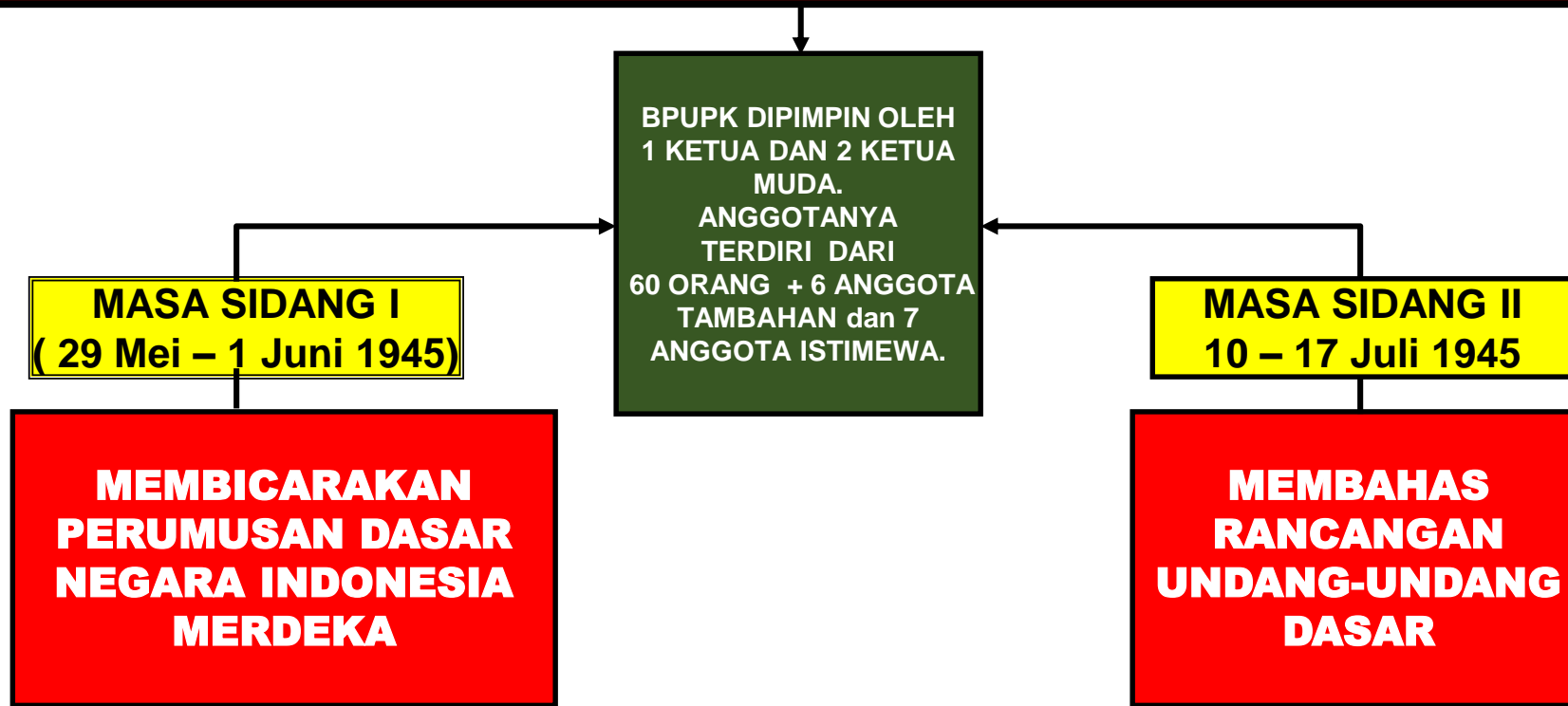
dan sasaran/target lainnya



SEJARAH PEMBENTUKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

SEJARAH PEMBENTUKAN PANCASILA OLEH BADAN PENYELIDIK USAHA-USAHA PERSIAPAN KEMERDEKAAN (BPUPK)

DIMASA AKHIR PERANG ASIA TIMUR RAYA TAHUN 1945, PADA TANGGAL 29 APRIL 1945, DIBENTUK SUATU BADAN YANG DIBERI NAMA BPUPK (*DOKURITZU ZUNBI TJOOSAKAI*) YANG BERTUGAS UNTUK MENYELIDIKI HAL-HAL PENTING YANG BERHUBUNGAN DENGAN BERBAGAI HAL YANG DIPERLUKAN UNTUK KEMERDEKAAN BANGSA INDONESIA.



* Dalam dokumen risalah rapat bernama BPUPK

SUSUNAN PENGURUS BPUPK

Ketua : dr. K.R.T Radjiman Wediodiningrat

Ketua Muda : Itjibangase Yosio

Ketua Muda : Raden Panji Soeroso

No	Anggota Masa Sidang I (29 Mei – 1 Juni 1945)	No	Anggota Masa Sidang I (29 Mei – 1 Juni 1945)	No	Anggota Tambahan Masa Sidang II (10-17 Juli 1945)
1	A.R. Baswedan	31	Mr. K.R.M.T. Wongsonagoro	61	Abdul Kaffar
2	Abdoel Kadir	32	Mr. Mohammad Yamin	62	B.K.P.A Soerjo Hamidjoyo
3	A. Kahar Moezzakir	33	Mr. R. Ahmad Soebardjo	63	Pengeran Mohammad Noor
4	Abikoesno Tjokrosoejoso	34	Mr. R. Hindromartono	64	K.H. Abdul Fatah Hasan
5	Agus Muhsin Dasaad	35	Mr. R. Mas Sartono	65	Mr. Mas Besar Martokoesoemo
6	Bendoro Pangeran Hario Poeroebojo	36	Mr. R. Pandji Singgih	66	R. Asikin Natanegara
7	Bendoro Pangeran Hario Bintoro	37	Mr. R. Samsoesin		
8	R. Boentaran Martoatmodjo	38	Mr. R. Sastroeljono		
9	Dr. Samsi Sastrawidagda	39	Mr. R. Soewandi		
10	Dr. Soekiman Wirjosandjojo	40	Mr. Soesanto Tirtoprojo		
11	Drs. K.R.M. Ario Sosrodiningrat	41	Mr. Tan Eng Hoa		
12	Drs. Mohammad Hatta	42	Ny. Mr. Maria Ulfa Santoso		
13	K.H. Abdoel Wachid Hasyim	43	Ny. R. Soekaptinah S. Mangoenpoespito		
14	H. Agus Salim	44	Oei Tiang Tjoei		
15	Ir. Ashar Sutedjo Moenandar	45	Oei Tjong Hauw		
16	Ir. R.M. Pandji Soerachman Tjokroadisoerjo	46	P.F. Dahler		
17	(Ir. Soekarno)	47	Parada Harahap		
18	K.H. Abdoel Halim	48	Prof. Dr. Mr. R. Soepomo		
19	K.H. Ahmad Sanoesi	49	Prof. Dr. Pangeran Ario Housein Djajadiningrat		
20	K.H. Mas Mansoer	50	Prof. Dr. R. Asikin Widjakoesoema		
21	K.H. Masjkoer	51	Prof. Ir. R. Rooseno		
22	K.R.M.T. Hario Woerjaningrat	52	R.A.A Soemitro Kolopaking Poerbonegoro		
23	Ki Bagoes Hadikoesoemo	53	R.A.A. Wiranatakoesoemah		
24	Ki Hadjar Dewantara	54	R. Abdoelrahim Pratalykrana		
25	Liem Koen Hian	55	R.M. Margono Djojohadikoesoemo		
26	Mas Aris	56	R.M.T. Ario Soerjo		
27	Mas Soetardjo Kartohadikoesoemo	57	R. Otto Iskandarinata		
28	Mr. A.A. Maramis	58	R. Roeslan Wongsokoesoemo		
29	Mpt. Dr. R. Koesomaatmadja	59	R. Soedirman		
30	Mr. J. Latuharhary	60	R. Soekardjo Wirjopranoto		
				No	Anggota Istimewa
				1	Ide Teitiro
				2	Itagaki Masamitu
				3	Masuda Toyohiko
				4	Matuura Mitikiyo
				5	Miyano Syoozoo
				6	Tanaka Minoru
				7	Tokonomi Tokuzi

4 ORANG KETURUNAN TIONGHOA DAN 1 ORANG KETURUNAN ARAB DALAM BPUPK



ALWAD ABDULRAHMAN BASWEDAN



LIEM KOEN HIAN



OEI TJANG TJOEI



OEI TJONG HAUW



TAN ENG HOA

DAFTAR PEMBICARA DI SIDANG BPUPK 29 MEI – 1 JUNI 1945

SIDANG BPUPK TANGGAL 29 MEI 1945



12 PEMBICARA

SIDANG BPUPK TANGGAL 30 MEI 1945



9 PEMBICARA

SIDANG BPUPK TANGGAL 31 MEI 1945



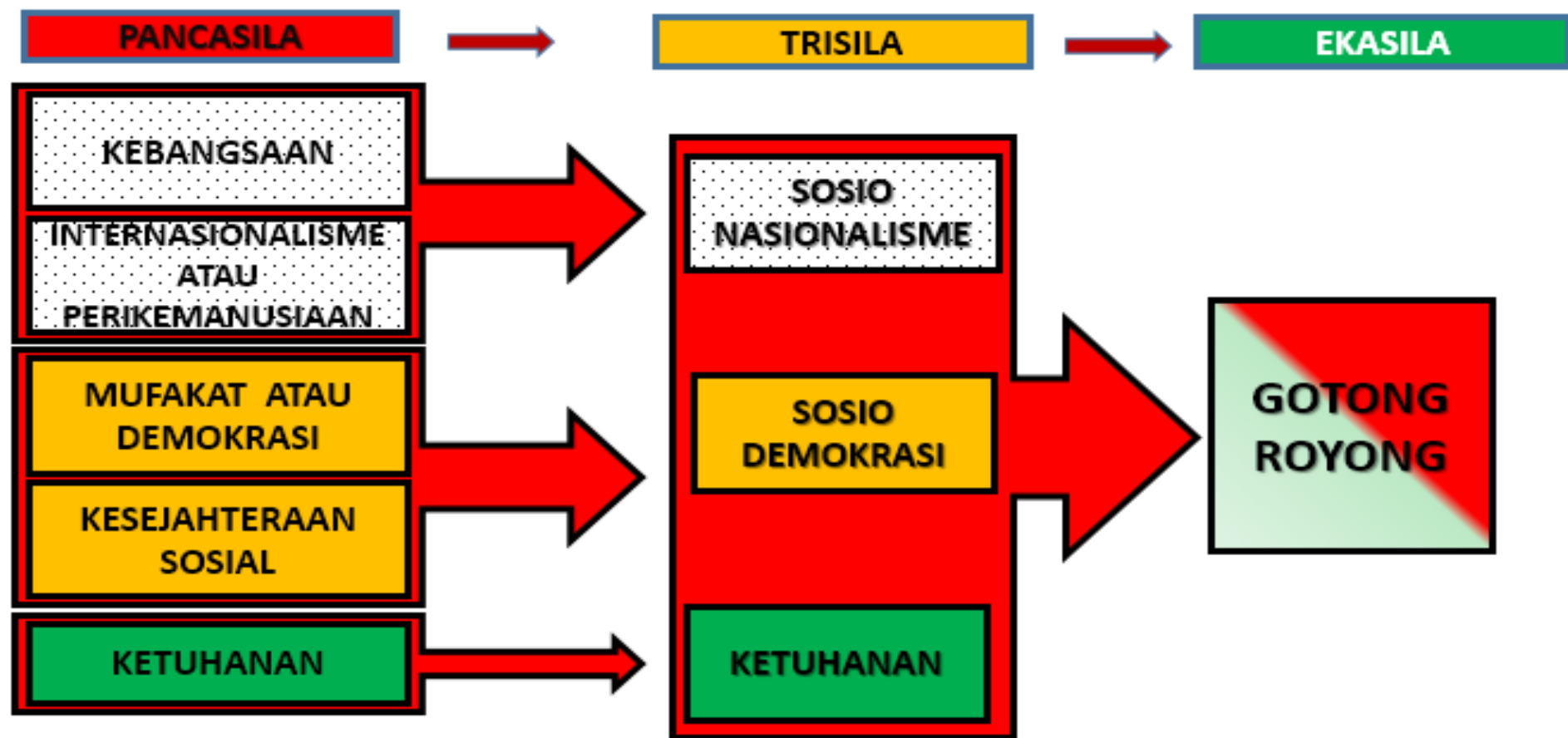
13 PEMBICARA

SIDANG BPUPK TANGGAL 1 JUNI 1945



6 PEMBICARA

PIDATO SOEKARNO, PANCASILA 1 JUNI 1945



(Sumber: Buku Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI , 2015, hal 30-33)

PANITIA DELAPAN DIBENTUK OLEH KETUA BPUPK dr. K.R.T. RADJIMAN WEDIODININGRAT



Bung Karno
(Ketua)



**R. Otto
Iskandardinata**
(Kebangsaan)



**Drs. Moh.
Hatta**
(Kebangsaan)



**M.S
Kartohadikoesoemoe**
(Kebangsaan)



**Mr. Moh
Yamin**
(Kebangsaan)



**Ki Bagoes
Hadikoesoemoe**
(Islam)



**Mr. A. A
Maramis**
(Kebangsaan)



K.H Wachid Hasjim
(Islam)

PANITIA SEMBILAN DIBENTUK ATAS PRAKARSA BUNG KARNO



Bung Karno
(Ketua)



Mr. A. Soebardjo
(Kebangsaan)



Drs. Moh. Hatta
(Kebangsaan)



K.H Wachid Hasjim
(Islam)



Mr. A.A Maramis
(Kebangsaan)



H. Agus Salim
(Islam)



Mr. Moh. Yamin
(Kebangsaan)

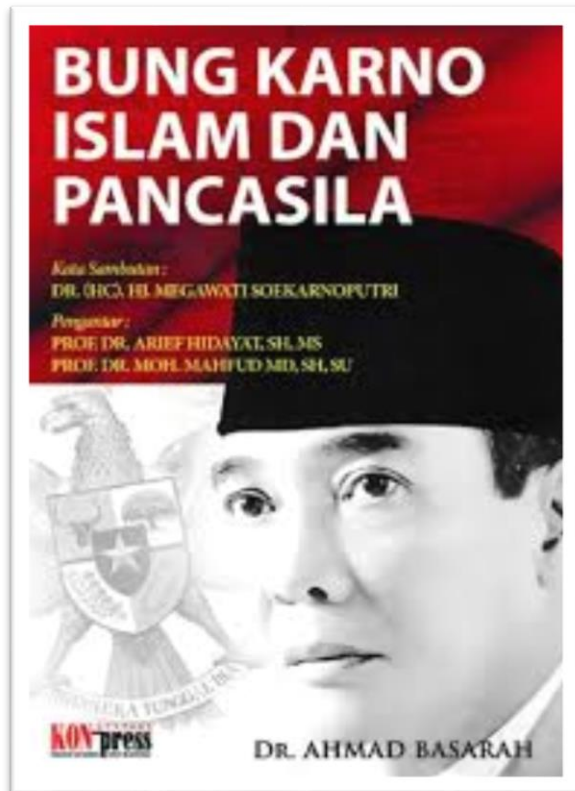


K.H. Kahar Moezakkir
(Islam)



R. Abikoeso
Tjokrosoejoso (Islam)

BUNG KARNO SEBAGAI JEMBATAN PEMERSATU GOLONGAN ISLAM DAN GOLONGAN KEBANGSAAN



Perubahan komposisi Panitia Delapan menjadi Panitia Sembilan dikarenakan keinginan baik Bung Karno untuk memberikan penghormatan kepada golongan Islam, dan menjaga keseimbangan antara golongan Islam dan golongan kebangsaan. Komposisi Panitia Sembilan ini dibuat lebih seimbang ketimbang Panitia Delapan. Panitia Sembilan yang diketuai oleh Bung Karno tersebut memang dibentuk sebagai ikhtiar untuk mempertemukan pandangan antara dua golongan, Islam dan kebangsaan, menyangkut dasar kenegaraan.

PANITIA SEMBILAN MELAHIRKAN PIAGAM JAKARTA 22 JUNI 1945

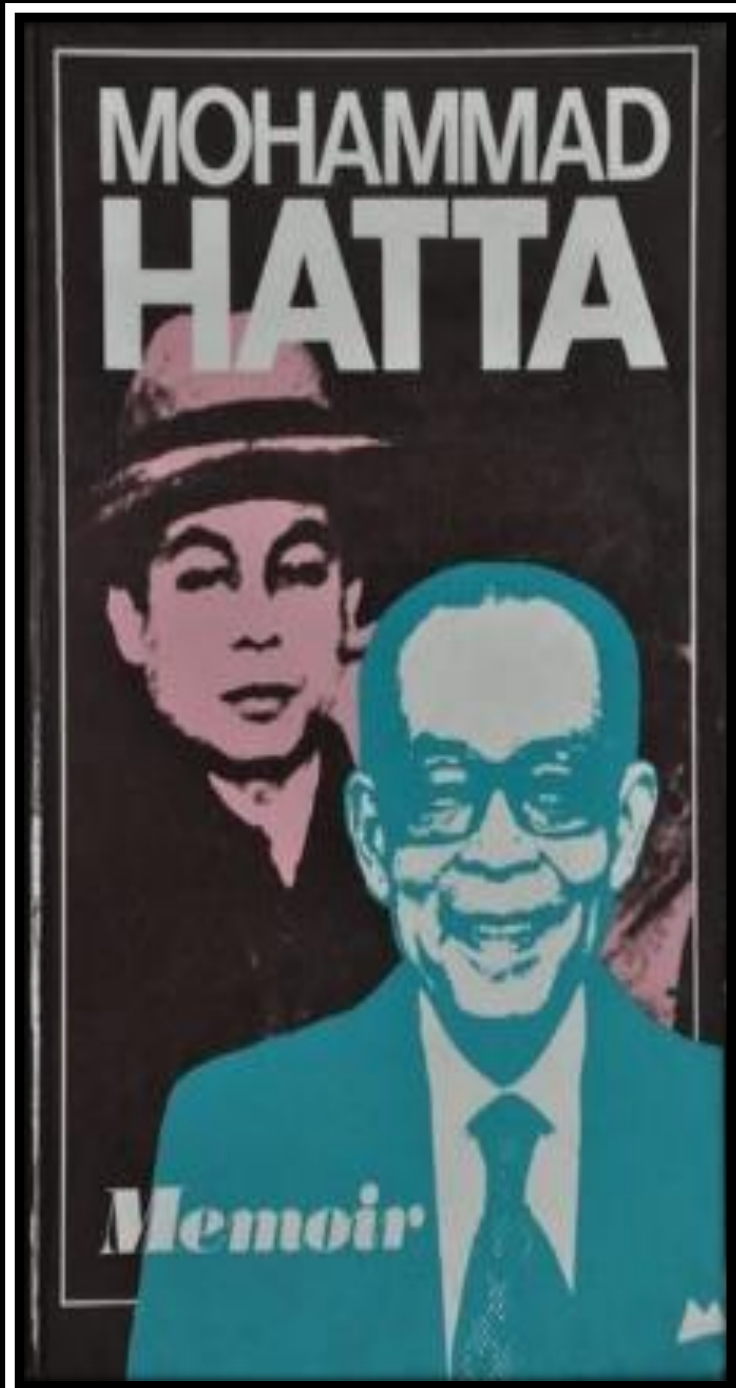
MUKADDIMAH

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



HILANGNYA TUJUH KATA INISIATIF MOHAMMAD HATTA

Berubahnya tujuh kata tersebut menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa telah diakui sendiri oleh Mohammad Hatta dalam bukunya *Memoir Mohammad Hatta*.

Bung Hatta menjelaskan bahwa pada pagi hari sebelum persidangan PPKI dilaksanakan tanggal 18 Agustus 1945, ia mengambil inisiatif untuk mendekati tokoh-tokoh Islam agar bersedia merubah tujuh kata dalam Piagam Djakarta menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa, alasannya demi persatuan Indonesia. Tokoh-tokoh Islam yang beliau dekati akhirnya bersedia merubah tujuh kata dalam Piagam Djakarta menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.

PEMBUKAAN UUD TAHUN 1945

(Disahkan 18 Agustus 1945 oleh PPKI)

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan yang maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

SUSUNAN PENGURUS PANITIA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA (PPKI)

1. Ir. Soekarno (Ketua)	12. Dr. Mohammad Amir (anggota)	22. Wiranatakoesoemah (anggota tambahan)
2. Drs. Moh. Hatta (Wakil Ketua)	13. Mr. Abdul Abas (anggota)	23. Ki Hadjar Dewantara (anggota tambahan)
3. Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat (anggota)	14. Dr. Ratulangi (anggota)	24. Mr. Kasman Singodimedjo (anggota tambahan)
4. Ki Bagoes Hadikoesoemo (anggota)	15. Andi Pangeran (anggota)	25. Sajuti Melik (anggota tambahan)
5. R. Otto Iskandardinata (anggota)	16. Mr. J. Latuharhary (anggota)	26. Mr. Iwa Koesoema Soemantri (anggota tambahan)
6. Pangeran Soerjohamidjojo (anggota)	17. Mr. Pudja (anggota)	27. Mr. Achmad Soebardjo (anggota tambahan)
7. B.P.H. Poeroebojo (anggota)	18. A.H. Hamidan (anggota)	
8. M. Soetardjo Kartohadikoesoemo (anggota)	19. R.P. Soeroso (anggota)	
9. Prof. Dr. Mr. Soepomo (anggota)	20. K.H. A. Wachid Hasjim (anggota)	
10. Abdul Kadir (anggota)	21. Mr. Mohammad Hassan (anggota)	
11. Dr. Yan Tiwan Bing (anggota)		
Sumber : Setjen Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku 1, hal. 32 dan 35.		

Keterangan : Pada 7 Agustus 1945, BPUPK dibubarkan dan diganti Dokuritu Zyunbi linkai (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI) dan diresmikan Jenderal Terauchi pada 9 Agustus 1945 di Kota Saigon, Vietnam. Tolchah Mansoer dalam Setjen Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945*, Buku 1, hal. 31.

Tanggal 18 Agustus 1945, kesepakatan yang terdapat dalam Piagam Jakarta tersebut diubah pada bagian akhirnya oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Hal penting yang diubah oleh panitia ini adalah tujuh kata setelah Ke-Tuhanan, yang semula berbunyi “Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,” diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. (Sumber : Sekretariat Jenderal MPR, Empat Pilar MPR, 2018, hlm. 37-38)

INDONESIA BERDIRI SEBAGAI NEGARA KETUHANAN

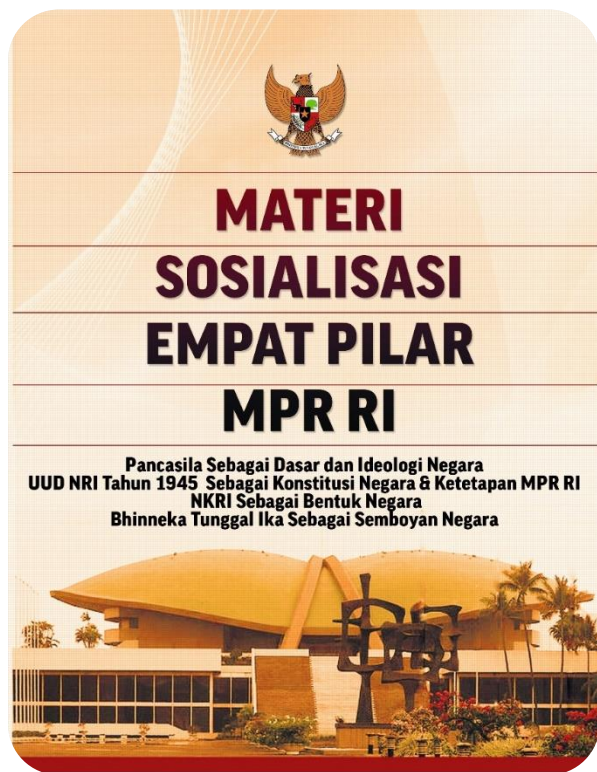
AKHIRNYA DENGAN DISEPAKATINYA KETUHANAN YANG MAHA ESA SEBAGAI DASAR PERTAMA NEGARA INDONESIA MERDEKA, MAKA NEGARA INDONESIA BUKAN NEGARA AGAMA (ATAU NEGARA SATU AGAMA) TETAPI JUGA BUKAN NEGARA SEKULER YANG MENYINGKIRKAN SAMA SEKALI NILAI-NILAI AGAMA DALAM SENDI-SENDI KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA. INDONESIA ADALAH NEGARA KETUHANAN BAGI SEMUA AGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

PANCA SILA HASIL IJITIHAD ULAMA BERSAMA PENDIRI BANGSA LAINNYA

**DENGAN DEMIKIAN, DISETUJUINYA PANCA SILA
SEBAGAI DASAR NEGARA DENGAN DASAR UTAMANYA
KETUHANAN YANG MAHA ESA ADALAH HASIL *IJITIHAD*
DAN PERSETUJUAN PARA ALIM ULAMA BERSAMA PARA
TOKOH-TOKOH PENDIRI NEGARA LAINNYA PADA WAKTU
ITU DEMI KEMERDEKAAN DAN PERSATUAN INDONESIA.**

**MAKA SEJAK DISAHKAN TANGGAL
18 AGUSTUS 1945, PANCA SILA SEBAGAI
DASAR NEGARA RESMI MENJADI MILIK
BANGSA INDONESIA, BUKAN MILIK SUATU
KELOMPOK, GOLONGAN APALAGI MILIK
SUATU REZIM PEMERINTAHAN.**

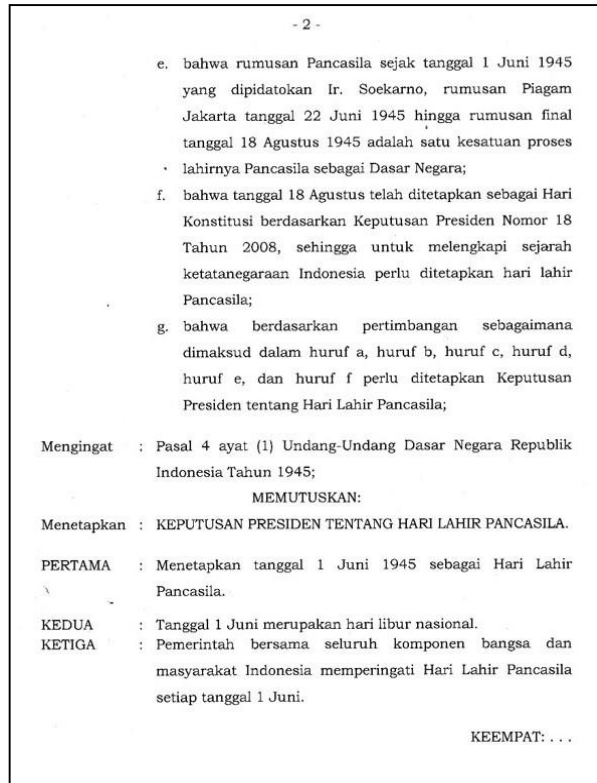
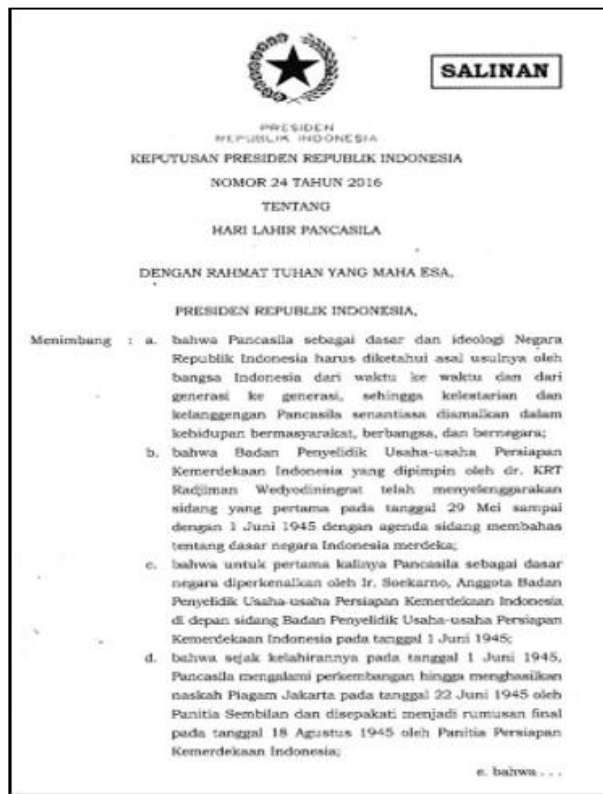
KESEPAKATAN MPR RI TENTANG SEJARAH LAHIRNYA PANCASILA



Secara historis ada tiga rumusan dasar negara yang diberi nama Pancasila, yaitu rumusan konsep Ir. Soekarno yang disampaikan pada pidato tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI, rumusan oleh Panitia Sembilan dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 dan rumusan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945

Dengan demikian, rangkaian dokumen sejarah yang bermula dari 1 Juni 1945, 22 Juni 1945, hingga teks final 18 Agustus 1945 dimaknai sebagai satu kesatuan dalam proses kelahiran Panca Sila sebagai dasar negara.

KESEPAKATAN MPR DIADOPSI PRESIDEN JOKO WIDODO MELALUI KEPPRES 24 TAHUN 2016 TENTANG HARI LAHIRNYA PANCASILA



KONSIDERAN KEPPRES 24 TAHUN 2016

E. BAHWA RUMUSAN PANCASILA SEJAK TANGGAL 1 JUNI 1945 YANG DIPIDATOKAN IR. SOEKARNO, RUMUSAN PIAGAM JAKARTA TANGGAL 22 JUNI 1945 HINGGA RUMUSAN FINAL TANGGAL 18 AGUSTUS 1945 ADALAH SATU KESATUAN PROSES LAHIRNYA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

KONSIDERAN KEPRES NO.24 TAHUN 2016 TENTANG HARI LAHIR PANCASILA

A. BAHWA PANCASILA SEBAGAI DASAR DAN IDEOLOGI NEGARA REPUBLIK INDONESIA HARUS DIKETAHUI ASAL USULNYA OLEH BANGSA INDONESIA DARI WAKTU KE WAKTU DAN DARI GENERASI KE GENERASI, SEHINGGA KELESTARIAN DAN KELANGGEGAN PANCASILA SENANTIASA DIAMALKAN DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA

B. BAHWA BADAN PENYELIDIK USAHA-USAHA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA YANG DIPIMPIN OLEH DR. KRT RADJIMAN WEDYODININGRAT TELAH MENYELENGGARAKAN SIDANG YANG PERTAMA PADA TANGGAL 29 MEI SAMPAI DENGAN 1 JUNI 1945 DENGAN AGENDA SIDANG MEMBAHAS TENTANG DASAR NEGARA INDONESIA MERDEKA;

C. BAHWA UNTUK PERTAMA KALINYA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DIPERKENALKAN OLEH IR. SOEKARNO, ANGGOTA BADAN PENYELIDIK USAHA-USAHA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA DI DEPAN SIDANG BADAN PENYELIDIK USAHA-USAHA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA PADA TANGGAL 1 JUNI 1945

KONSIDERAN KEPRES NO.24 TAHUN 2016 TENTANG HARI LAHIR PANCASILA

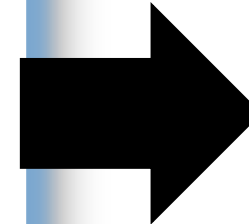
D. BAHWA SEJAK KELAHIRANNYA PADA TANGGAL 1 JUNI 1945, PANCASILA MENGALAMI PERKEMBANGAN HINGGA MENGHASILKAN NASKAH PIAGAM JAKARTA PADA TANGGAL 22 JUNI 1945 OLEH PANITIA SEMBILAN DAN DISEPAKATI MENJADI RUMUSAN FINAL PADA TANGGAL 18 AGUSTUS 1945 OLEH PANITIA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA;

E. BAHWA RUMUSAN PANCASILA SEJAK TANGGAL 1 JUNI 1945 YANG DIPIDATOKAN IR. SOEKARNO, RUMUSAN PIAGAM JAKARTA TANGGAL 22 JUNI 1945 HINGGA RUMUSAN FINAL TANGGAL 18 AGUSTUS 1945 ADALAH SATU KESATUAN PROSES LAHIRNYA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

F. BAHWA TANGGAL 18 AGUSTUS TELAH DITETAPKAN SEBAGAI HARI KONSTITUSI BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2008, SEHINGGA UNTUK MELENGKAPI SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA PERLU DITETAPKAN HARI LAHIR PANCASILA;

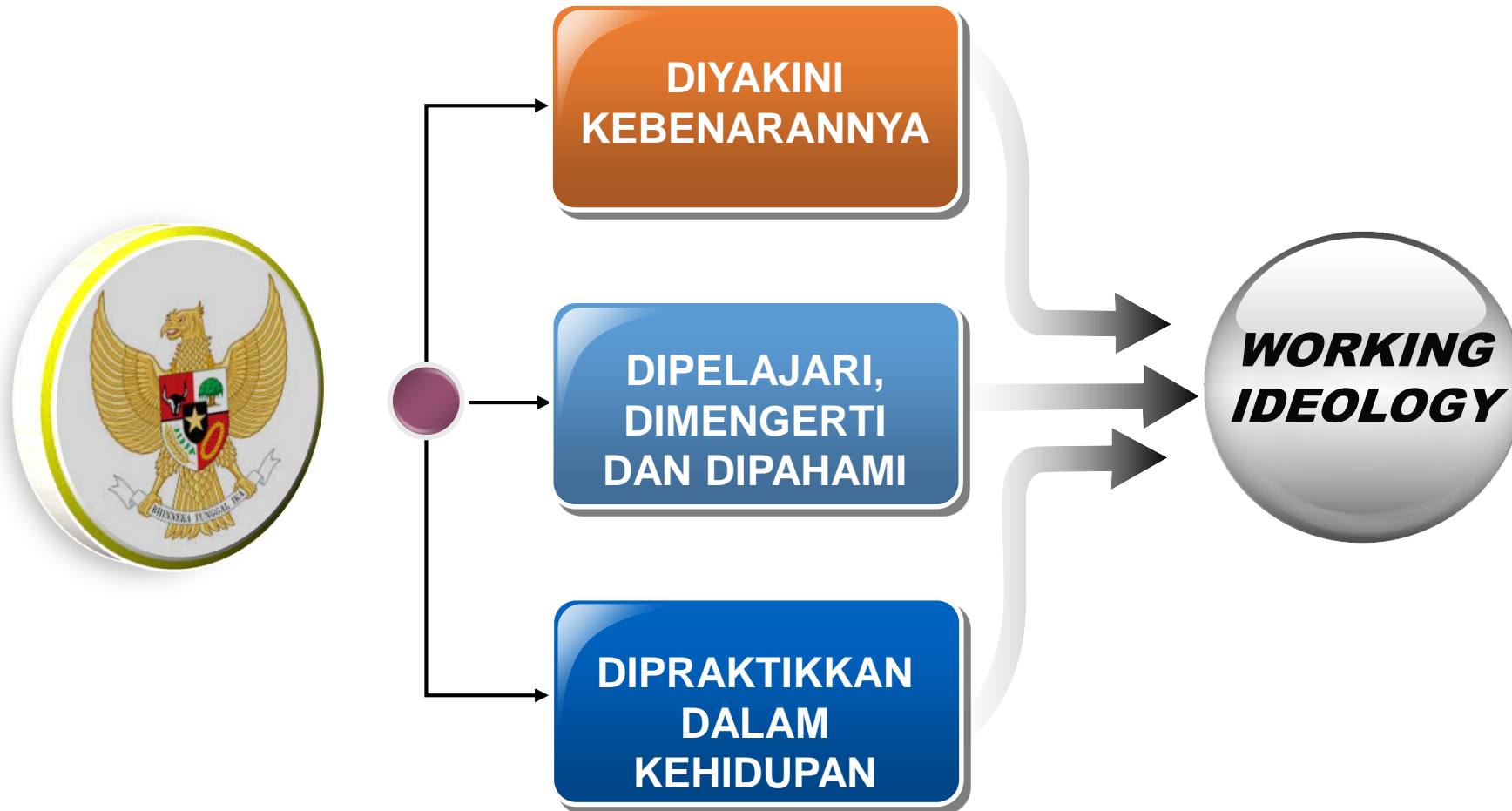
FUNGSI PANCASILA

- 1. DASAR FALSAFAH NEGARA (PHILOSOFISCHE GRONDSLAG) → DASAR NEGARA → GRUNDORM → SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM NEGARA.**
- 2. PANDANGAN HIDUP BANGSA (WELTANSCHAUUNG) → IDEOLOGI**
- 3. PANCASILA SEBAGAI CITA-CITA DAN TUJUAN BANGSA INDONESIA**
- 4. PANCASILA PEMERSATU BANGSA INDONESIA**
- 5. PERJANJIAN LUHUR PENDIRI BANGSA INDONESIA**



**PEDOMAN HIDUP
BERBANGSA DAN
BERNEGARA.**

TIGA SYARAT PANCA SILA MENJADI *WORKING IDEOLOGY*




**KERAGAMAN INDONESIA ADALAH TAKDIR TUHAN
YANG MAHA KUASA**

RUKUN IMAN

- 1. Percaya Kepada Allah**
- 2. Percaya Kepada Malaikat**
- 3. Percaya Kepada Kitab Al Quran**
- 4. Percaya Kepada Rasul**
- 5. Percaya Kepada Hari Kiamat**
- 6. Percaya Kepada Qadha' & Qadar**

TAKDIR BANGSA-BANGSA DI DUNIA SEBAGAI TAKDIR ALLAH SWT

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُسُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ



HAI MANUSIA, SESUNGGUHNYA KAMI MENCIPTAKAN KAMU DARI SEORANG LAKI-LAKI DAN SEORANG PEREMPUAN DAN MENJADIKAN KAMU BERBANGSA-BANGSA DAN BERSUKU-SUKU SUPAYA KAMU SALING MENGENAL. SESUNGGUHNYA ORANG PALING MULIA DIANTARA KAMU DI SISI ALLAH ADALAH ORANG PALING BERTAKWA DI ANTARA KAMU. SESUNGGUHNYA ALLAH MAHA MENGETAHUI LAGI MAHA MENGENAL. QS: AL HUJURAT AYAT 13

TAKDIR TUHAN YME UNTUK BANGSA INDONESIA



1.905 JUTA KM PERSEGI

LUAW WILAYAH 5.193.250 KM PERSEGI (TERBESAR DAN TERLUAS KE 7 DI DUNIA SETELAH RUSIA, KANADA, AMERIKA SERIKAT, CHINA, BRASILA DAN AUSTRALIA

2/3 – NYA ADALAH LAUTAN (NEGARA KEPULAUAN TERLUAS DI DUNIA)

17.504 PULAU

733 BAHASA

1.340 SUKU

6 AGAMA DAN PULUHAN ALIRAN KEPERCAYAAN

SEBELUM



IRAK

SESUDAH



LIBYA



YAMAN



SYRIA



SEBELUM

SESUDAH





Tanpa Pancasila,
Masyarakat Indonesia Tidak
Akan Pernah Bersatu!

ISLAM DAN NASIONALISME IBARAT DUA REL KERETA API

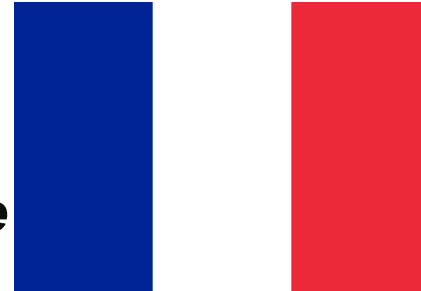


Dalam konteks Indonesia, baik antara Islam dan Nasionalisme maupun antara Golongan Islam dan Golongan Nasionalis ibarat dua rel kereta api. Keduanya harus terus bersinergi dan berdampingan dengan kokoh serta seimbang. Jika salah satu relnya patah maka bukan hanya kereta api yang berada di atasnya tidak dapat mengantarkan penumpangnya sampai kepada tujuannya. Namun Akibat fatalnya adalah kereta api itu akan terjungkal dan mencelakakan para penumpang yang ada di dalamnya.

BANGSA YANG BESAR ADALAH BANGSA YANG BERPIJAK PADA FALSAFAH BANGSANYA SENDIRI



Amerika Serikat :
Liberalisme
Declaration of independence



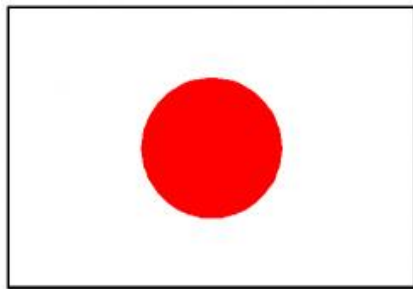
Perancis:
Liberte (Kebebasan),
Egalite (Keadilan),
Fraternite (Persaudaraan)



China:
Komunisme
Taoisme dan Konfusionisme



Arab Saudi :
Islam



Jepang:
Shintoisme dan
Konfusionisme



Indonesia:
Pancasila

TERIMA



KASIH